

Protection of the Right of Access to Justice towards Persons with Disabilities in Indonesia pursuant to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

By:

Hasna Ratri Desvatra¹

ABSTRACT

This legal research is aimed to analyzed and understand the protection of the right of access to justice towards persons with disabilities in Indonesia vis a vis Article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

This legal research used normative approach to answer the research question. The data was acquired through primary, secondary, and tertiary research. This research also scrutinized secondary data in the form of literature research. Such data are analyzed through qualitative data analysis as the data analysis method. Methods of interpretation relied upon by this research are grammatical, systematic, extensive, and sociological interpretation.

The result of this legal research concluded that to protect the right of access to justice of persons with disabilities, Indonesia has provided numerous legislations from stipulating laws to government regulations. Those legislations also involved various state institutions from different sectors, acknowledge concepts enshrined in CRPD by referencing the CRPD and terms included therein. Thus, generally Indonesia has enacted legislations implementing Article 13 of CRPD in satisfactory manner. However, issues have also been identified on the lack of implementing and technical regulations on reasonable accommodation.

Keywords: Access to justice, persons with disabilities, Article 13, Convention on The Rights of Persons with Disabilities, reasonable accommodation, Indonesia

¹ Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S-1 IUP 2014)

Perlindungan Hak Akses terhadap Peradilan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Oleh:

Hasna Ratri Desvatra²

INTISARI

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hak akses terhadap peradilan bagi penyandang disabilitas di Indonesia di lihat dari Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Data pada penelitian ini didapatkan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga meneliti data sekunder dalam bentuk studi literatur. Data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode interpretasi yang digunakan pada penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, sistematis, ekstensif, dan sosiologis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk melindungi hak akses terhadap peradilan bagi penyandang disabilitas, Indonesia telah menyediakan beberapa peraturan dari Undang-Undang hingga Peraturan Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut juga mengikutsertakan berbagai macam institusi pemerintahan dari sektor-sektor yang berbeda dan mengakui konsep disabilitas yang digunakan oleh CRPD melalui referensi terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sehingga, secara garis besar, Indonesia sudah menetapkan peraturan-peraturan untuk melaksanakan mandat Pasal 13 CRPD dengan cukup memuaskan. Namun, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu kurangnya peraturan pelaksana dan peraturan teknis dalam hal penyediaan akomodasi yang layak dalam peradilan.

Kata kunci: Akses terhadap peradilan, penyandang disabilitas, Pasal 13, Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, akomodasi yang layak, Indonesia

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (S-1 IUP 2014)